

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur digunakan oleh penulis guna membantu menjelaskan variabel bebas, variabel terikat, dan keduanya. Sejumlah karya ilmiah atau karya tulis, penulis jadikan sebuah referensi dan juga penulis jadikan sebuah acuan yang mana membahas mengenai kondisi politik di kawasan Timur Tengah, potensi yang dimiliki oleh negara di kawasan Timur Tengah khususnya negara Uni Emirat Arab dengan Israel, pandangan negara-negara di kawasan Timur Tengah kepada Israel, hingga pembahasan atau sebuah analisis mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Israel dengan Uni Emirat Arab melalui perjanjian *Abraham Accords* pada tahun 2020 di Washington, D.C Amerika Serikat, serta hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab saat sebelum perjanjian tersebut disepakati. Penulis mencoba mengumpulkan informasi dan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik yang penulis jabarkan yang mana penulis jadikan sebuah penjabaran, ulasan, dan juga ide yang dimiliki penulis tentang berbagai sumber pustaka yang sesuai dengan topik yang dibahas.

Literatur pertama dari penulis A Rizki Tahmi, Mohamad Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian yang berjudul “*Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel*” tahun 2022, dalam literatur jurnal ini merupakan jurnal yang paling bisa dijadikan referensi dengan penelitian yang penulis jabarkan, dengan menganalisis kerja sama yang terjadi antara Uni Emirat Arab dengan Israel dan difokuskan kepada kepentingan Uni

Emirat Arab. Persamaan antara literatur ini dengan penelitian yang penulis bahas yakni dalam aktor negara yang dibahas yakni Uni Emirat Arab dengan Israel dengan topik general yang mana membahas mengenai kerja sama kedua negara tersebut, sedangkan dalam perbedaannya terdapat pada fokus judul yang berbeda, yang mana literatur jurnal ini membahas secara general atau menyeluruh, sedangkan penelitian yang penulis buat memfokuskan kepada perspektif pertahanan dan keamanan nasional.

Jurnal tersebut menggunakan teori dan konsep yaitu konsep kepentingan nasional, teori ketergantungan, dan teori liberalisme. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa kepentingan Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Israel dikarenakan adanya sebuah ancaman yang berasal dari Iran karena adanya pengembangan senjata nuklir dan ancaman tersebut membuat Uni Emirat Arab khawatir lalu bekerja sama dengan Israel dengan tujuan untuk menghentikan pengembangan yang dilakukan Iran, dengan melakukan sebuah *lobby* pada sidang PBB. Jurnal ini pun mengungkapkan bahwa ada 4 kepentingan Uni Emirat Arab untuk mengubah kebijakan untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel, yaitu kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan perdamaian. Dengan kepentingan tersebutlah membuat Uni Emirat Arab mengubah kebijakannya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Kepentingan politik dan keamanan Uni Emirat Arab dikelompokkan sebagai *defense of homeland* dengan *level* urgensi *vital* hal itu dikarenakan kepentingan politik dan keamanan Uni Emirat Arab mempengaruhi kedaulatan negara dan juga sangat penting bagi Uni Emirat Arab. Lalu kepentingan ekonomi Uni Emirat Arab masuk ke dalam kelompok *economic well-being* dengan *level* urgensi *major* dikarenakan kepentingan ekonomi tersebut

dapat menunjang perekonomian Uni Emirat Arab ke jalan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan perdamaian Uni Emirat Arab masuk ke dalam kelompok *favorable world order* dengan *level* urgensi *peripheral* karena dengan terbentuknya normalisasi hubungan ini Uni Emirat Arab sebagai negara yang mempunyai hubungan diplomatik secara langsung dengan Israel dapat menjadi mediator dalam konflik ini, selain itu Uni Emirat Arab dapat juga melakukan penekanan terhadap Israel sebagai negara yang memiliki hubungan langsung akan tetapi kepentingan ini bukan sebagai kepentingan utama bagi Uni Emirat Arab (Tahmi et al., 2022).

Literatur kedua ditulis oleh Ahmad Mudhofar Al Baqi dengan judul *“From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations”* tahun 2022. Literatur jurnal ini mengkaji alasan yang mendorong Uni Emirat Arab mengubah kebijakan normalisasi hubungan dengan Israel melalui *Abraham Accords*. Sementara Israel dan Uni Emirat Arab, tidak seperti Uni Emirat Arab, adalah negara Teluk (GCC) dan Liga Arab, yang telah lama berkonflik dengan Israel atas tindakannya terhadap Palestina. Kode analitik berbasis identitas dengan penelitian penjelasan dan model struktural seperti itu kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Literatur ini mengungkap adanya perbedaan identitas agama yang tidak serta merta menjadi penghalang bagi Uni Emirat Arab dan Israel untuk menormalisasi hubungan. Normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab terjadi sebagai akibat dari ancaman regional yang ditimbulkan oleh langkah agresif Iran di kawasan Timur Tengah. Konteks ancaman yang dilancarkan oleh Iran menciptakan identitas kolektif antara Uni Emirat Arab dan Israel sebagai teman baik, sementara Iran menjadi musuh

bersama. Identitas kolektif terdiri dari proses saling ketergantungan yang sistematis antara Uni Emirat Arab dan Israel dengan kedekatan kedua negara dengan Amerika Serikat. Identitas kolektif dibentuk oleh kegiatan strategis pemulihan hubungan antara para pemimpin kedua negara. Uni Emirat Arab dan Israel juga dipersatukan oleh identitas agama Ibrahim (Baqi, 2022).

Literatur ini memiliki persamaan yakni pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel serta membahas juga mengenai keamanan nasional nya karena ancaman yang dilakukan oleh negara Iran, sedangkan perbedaannya terdapat pada penggunaan teori yang mana literatur ini menggunakan dan teori *Collective identity*.

Untuk **literatur ketiga** ditulis oleh Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono yang berjudul "*Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina*". Literatur ini menggunakan teori Teori Realisme, Konsep Identitas, Konsep Normalisasi Konsep, dan Teori *Balance of power*. Literatur tersebut membahas mengenai Uni Emirat Arab dan Israel yang sudah saling menandatangani perjanjian *Abraham Accords* pada 15 September 2020, literatur tersebut mengungkapkan bahwa kedua negara tersebut sudah menjalin hubungan yang baik dan lancar sehingga dapat menandatangani perjanjian tersebut. Penelitian literatur tersebut memiliki tujuan kepentingan Uni Emirat Arab dalam menjalin hubungan kerja sama dengan Israel dan juga membahas mengenai pandangan negara lain terhadap kerja sama yang dilakukan kedua negara tersebut khususnya wilayah Timur Tengah (Wicaksono, 2020).

Literatur ketiga ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis bawa yakni dari pembahasan yang sama yakni membahas wilayah Timur Tengah dan berfokus pada kerja sama Uni Emirat Arab dengan Israel, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus judul yang mana dalam literatur ini membahas pula pihak ketiga untuk dijadikan fokus pembahasan.

Literatur keempat ditulis oleh Marwan Muasher dengan judul literatur *“Normalization of Arab Countries with Israel: Regional Geopolitical Aspects of the Agreements”*. Literatur tersebut menggunakan teori Teori Realisme, Konsep Kekuasaan, Teori Interdependensi, dan Konsep Identitas. Jurnal ini membahas Sebagai seorang analis politik dan diplomat, Marwan Muasher mengeksplorasi dampak perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab di Timur Tengah. Ia menganalisis peran kunci yang dimainkan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain dalam menormalisasi hubungan dengan Israel, serta implikasi politik dan keamanan regional dari normalisasi ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa normalisasi hubungan antara Arab dan Israel, meskipun menimbulkan banyak kontroversi dan protes, dapat memiliki dampak positif pada stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Namun, ia juga menekankan bahwa normalisasi ini harus diperhatikan dalam konteks regional yang lebih luas, termasuk krisis Palestina dan peran Iran dalam politik regional. Muasher juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kepentingan nasional dan keamanan dalam setiap keputusan normalisasi, sambil tetap menghormati aspirasi rakyat di negara-negara Arab yang merasa terhina oleh kebijakan Israel terhadap Palestina (Chessboard et al., 1967).

Literatur keempat ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis bawa yaitu terletak pada aktor negara yang dibahas yakni Uni Emirat Arab dengan Israel dengan topik general nya yakni pembahasan normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada penggunaan konsep identitas dan juga terletak pada fokus judul yang lebih luas seperti Menganalisis dampak normalisasi hubungan antara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dengan Israel terhadap politik regional di Timur Tengah.

Untuk **literatur kelima** ditulis oleh Katie Wachsberger yang berjudul *“Opportunities and Challenges for Israel-UNI EMIRAT ARAB Economic Cooperation”* pada tahun 2021. Literatur ini membahas membahas tentang peluang dan tantangan dalam kerja sama ekonomi antara Israel dan Uni Emirat Arab yang terbentuk setelah normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun 2020. Penulis menggambarkan potensi besar dalam kerja sama ekonomi antara kedua negara, termasuk dalam bidang teknologi, investasi, pariwisata, dan perdagangan, serta menunjukkan bahwa normalisasi hubungan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak.

Namun, penulis juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam mengembangkan kerja sama ekonomi antara kedua negara, termasuk masalah keamanan dan ketegangan geopolitik di wilayah tersebut, perbedaan budaya dan bahasa, serta kebijakan proteksionis yang masih ada di beberapa sektor ekonomi di kedua negara. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan analisis yang baik tentang peluang dan tantangan dalam kerja sama ekonomi antara Israel dan Uni Emirat Arab setelah normalisasi hubungan

diplomatik. Namun, perlu dicatat bahwa jurnal ini terbatas hanya pada aspek ekonomi dan tidak membahas isu-isu politik atau sosial yang terkait dengan normalisasi hubungan antara kedua negara (Wachsberger, 2021).

Literatur ini memiliki persamaan dalam membahas potensi dan peluang yang terdapat pada kerja sama Uni Emirat Arab dengan Israel, sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus judul yang mana literatur ini berfokus pada peluang dan tantangan melalui perspektif ekonomi.

Dan terakhir untuk **literatur keenam** ditulis oleh Daniela Traub, Ronen A. Cohen, dan Chen Kertcher dengan judul *“The road to normalization: The importance of the United Arab Emirates' neoliberal foreign policy in the normalization with Israel: 2004–2020”* pada tahun 2022. Artikel ini membahas pertanyaan mengapa dan bagaimana normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel terjadi dan berhasil berkembang menjadi kesepakatan damai. Ini menawarkan penjelasan tambahan untuk argumen para neorealis yang ilmiah dan diterima secara umum: bahwa hanya perilaku negara revisionis Iran yang menjadi motif untuk menandatangani perjanjian damai antara kedua negara. Selain itu, artikel tersebut berpendapat bahwa normalisasi hubungan dimulai pada tahun 2004 dan dapat terwujud karena kebijakan luar negeri neoliberal Uni Emirat Arab yang berfokus pada kerja sama kekuatan lunak. Ini menunjukkan kepentingan internal Uni Emirat Arab atas status, stabilitas, dan pemberdayaan, yang tergabung dalam rencana Visi 2021, diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri kerja sama internasional daripada salah satu keterlibatan dan aliansi militer. Strategi jangka panjang Uni Emirat Arab mengungkapkan kebijakan luar negeri ganda neorealis dan neoliberal dengan kecenderungan ke arah yang terakhir.

Kebijakan luar negeri neoliberal dari kerja sama *soft power* menarik Uni Emirat Arab ke Israel dan, melalui kepentingan bersama ini, membangun kepercayaan dan akhirnya mengarah pada normalisasi antara kedua negara (Traub et al., 2023).

Persamaan literatur ini terdapat pada studi kasus yang dibahas yakni kerja sama Uni Emirat Arab dengan Israel secara general, perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan seperti Teori Neoliberalisme, Konsep Ketergantungan, Konsep Kebijakan Luar Negeri, dan Teori Konstruktivisme serta dalam fokus pembahasan yang terdapat pada literatur ini.

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Teori	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel</i>	konsep kepentingan nasional, Teori Ketergantungan, dan Teori Liberalisme	A Rizki Tahmi, Mohamad Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian	Persamaan dalam aktor negara yang dibahas yakni Uni Emirat Arab dengan Israel.	Perbedaannya terdapat pada fokus judul yang berbeda, yang mana literatur jurnal ini membahas secara general atau menyeluruh, sedangkan penelitian yang penulis buat memfokuskan kepada perspektif pertahanan dan keamanan nasional.
2	<i>From Foes to Friends: The Normalization of the United Emirates Arab and Israel Relations</i>	Teori Konstruktivisme, Teori <i>Collective identity</i>	Ahmad Mudhofarul Baqi	Persamaannya yaitu dalam membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel serta membahas juga mengenai keamanan nasionalnya karena ancaman yang dilakukan oleh negara Iran.	Perbedaannya terdapat pada penggunaan teori yang mana literatur ini menggunakan dan teori <i>Collective identity</i> .

3	<i>Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina</i>	Teori Realisme, Konsep Identitas, Konsep Normalisasi Konsep, dan Teori <i>Balance of power</i>	Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono	Persamaan nya terletak pada pembahasan di wilayah Timur Tengah dan berfokus pada kerja sama Uni Emirat Arab dengan Israel dan juga pada teori yang digunakan yakni teori realisme.	Perbedaan nya terletak pada fokus judul yang mana dalam literatur ini membahas pula pihak ketiga untuk dijadikan fokus pembahasan.
4	<i>Normalization of Arab Countries with Israel: Regional Geopolitical Aspects of the Agreements</i>	Teori Realisme, Konsep Kekuasaan, Teori Interdependensi, dan Konsep Identitas	Marwan Muasher	Persamaan terletak pada aktor negara yang bahas yakni Uni Emirat Arab dengan Israel dengan topik general nya yakni pembahasan normalisasi hubungan antara kedua negara tersebut.	Perbedaan nya terdapat pada teori realisme dan konsep identitas dan juga terletak pada fokus judul yang lebih luas seperti Menganalisis dampak normalisasi hubungan antara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dengan Israel terhadap politik regional di Timur Tengah.
5	<i>Opportunities and Challenges for Israel-UNI EMIRAT ARAB Economic Cooperation</i>	Teori Perdagangan Internasional, Teori Aliansi, Konsep Diplomasi Ekonomi, Konsep Keamanan Ekonomi, dan Teori Integrasi Regional	Katie Wachsberger	Membahas potensi dan peluang yang terdapat pada kerja sama Uni Emirat Arab dengan Israel	Perbedaan nya terdapat dalam fokus judul yang mana literatur ini berfokus pada peluang dan tantangan melalui perspektif ekonomi.
6	<i>The road to normalization : The importance of the United Arab Emirates' neoliberal foreign policy in the normalization</i>	Teori Neoliberalisme, Konsep Ketergantungan, Konsep Kebijakan Luar Negeri, dan Teori Konstruktivisme	Daniela Traub, Ronen A. Cohen, Chen Kertcher	Persamaan nya terdapat pada studi kasus yang dibahas yakni kerja sama Uni Emirat Arab dengan Israel.	Perbedaan nya terdapat pada teori yang digunakan seperti Teori Neoliberalisme, Konsep Ketergantungan, dan Konsep Kebijakan Luar Negeri. Selain itu fokus pembahasannya pun

	<i>with Israel: 2004–2020</i>				berbeda.
--	-----------------------------------	--	--	--	----------

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Dengan menggunakan beberapa teori yang penulis gunakan, guna menguatkan analisis dan juga untuk memudahkan proses dalam penelitian ini, diperlukan beberapa konsep dan teori. Dengan menyesuaikan isu yang diangkat dalam penelitian ini serta dilakukannya sebuah pengamatan dalam kasus tersebut serta pendekatan teoritis dengan didasari dari berbagai objek penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli sekaligus kerangka konseptual yang relevan untuk penelitian ini. Dengan adanya kerangka konseptual, bertujuan untuk memahami serta untuk menganalisis, dengan menggunakan sebuah paradigma dan juga hal yang mendukung dengan pendapat para tokoh di masukan dalam penelitian ini. Dengan begitu, penulis menggunakan sejumlah teori dan juga konsep yang digunakan, seperti berikut:

2.2.1 *Realisme*

Proses perkembangan studi hubungan internasional, teori realisme menjadi pendekatan yang paling berpengaruh sejak tahun 1940-an dan seterusnya, dimana hal tersebut menggantikan pendekatan idealisme yang dominan sejak tahun 1919. Studi tentang hubungan internasional pada tahun 1930-an, selain membentuk teori hubungan internasional dan juga politik internasional, perspektif realis juga memberikan resep bagi politik transnasional.

Terdapat beberapa tokoh dari studi hubungan internasional yang dapat membuat pandangan realisme menjadi unggul di kalangan studi hubungan internasional, dan mereka adalah Harold J. Mackinder, E.H. Carr, Nicholas

Spykman dan Hans J. Morgenthau. Akan tetapi jauh sebelum studi hubungan internasional dikembangkan secara resmi sejak tahun 1919 sudah ada tokoh-tokoh lain yang sudah dikenal juga mendasari pandangan realisme, namun mereka belum terfokus pada studi hubungan internasional.

Terdapat banyak tokoh yang dapat disebut realis, seperti contohnya yaitu Niccolo Machiavelli (1469-1527), dan Thomas Hobbes (1588-1679). Selain itu, terdapat juga beberapa para politisi yang mana mencerminkan sikap realisnya, contohnya seperti, Cardinal de Richelieu, Otto von Bismarck, dan Abraham Lincoln. Richelieu sepanjang Perang 30 Tahun yang menuju Perjanjian *Westphalia* pada tahun 1648, mulai membahas konsep teori kepentingan nasional, keamanan politik, dan *raison d'etat*. Bismarck, negarawan Prusia, yang menciptakan dan memakai konsep perimbangan kekuatan (*balance of power*).

Hobbes pada tahun 1651 menuliskan sebuah buku dengan judul *Leviathan* menyebutkan:

“Secara derajat, manusia itu setara dengan yang lainnya dimana masing-masing individu memiliki hasrat akan kekayaan, kekuasaan, pengetahuan, dan kehormatan (appetite) dan mencoba untuk tidak hidup sengsara dan mati (aversions)”.

Hobbes juga menegaskan:

“Kehormatan dan kematian manusia itu tidak terbatas, dan untuk melaksanakannya manusia menggunakan kekuatannya, sehingga terjadi sebuah benturan kekuatan antar manusia.”

Dengan didasari oleh beberapa penjelasannya, Hobbes memiliki asumsi bahwa derajat hubungan antar manusia memiliki sifat seperti anarkis dan juga

“Pertama, hubungan internasional sangat lah berbeda dari hubungan individu dengan individu lain nya di dalam masyarakat yang dikelola oleh negara. Hubungan internasional tidak dikendalikan oleh negara yang mana menggunakan tata tertib. Kedua, kondisi hubungan internasional itu adalah perang semua melawan semua (bellum omnium contra omnes), dengan arena di mana setiap negara saling melawan, dalam arti pencapaian satu negara adalah sebuah kehilangan dari negara lain (Dugis, 2018).”

konflikual. Untuk pandangan realisme, Hobbes menyatakan dua hal yaitu;

Menurut teori realisme klasik, negara-negara cenderung saling curiga dan bersaing satu sama lain dalam mencapai keamanan. Namun, mereka juga menyadari bahwa kerja sama dapat memberikan manfaat dalam mencapai tujuan keamanan mereka. Oleh karena itu, kerja sama keamanan tradisional terjadi ketika negara-negara secara sukarela bekerja sama untuk mengatasi ancaman bersama atau mempromosikan kepentingan keamanan bersama.

Dalam teori realisme klasik, kerja sama keamanan cenderung muncul karena ada nya kepentingan keamanan yang saling menguntungkan. Antar negara yang bekerja sama disaat mereka merasa ancaman yang mereka dapat sangatlah serius dan merasa bahwa tidak dapat mereka hadapi sendiri. Akan tetapi, kerja sama ini dapat juga dipengaruhi oleh ketidakpastian, saling ketergantungan, atau faktor-faktor lain yang mendorong negara-negara untuk mencari kekuatan kolektif dalam menghadapi ancaman.

Teori realisme klasik menganggap bahwa negara adalah aktor utama dengan masalah utama nya yakni keamanan nasional dengan memfokuskan kedalam isu-isu yang mana saling berkaitan dengan sebuah negara yang dapat mengancam

keamanan nasional, selain itu, kekuatan atau *power* negara adalah konsep utama dalam teori ini (Transnasional, 2012).

Dengan penjelasan diatas, membuat studi kasus kerja sama antara Uni Emirat Arab dengan Israel sangatlah berkaitan, ditambah dengan fokus judul pada penelitian ini yaitu keamanan nasional yang mana kedua negara tersebut dalam perjanjian *Abraham Accords* saling menyepakati kerja sama militer yang mana kedua negara tersebut sama-sama memiliki ancaman militer dari negara Iran. Dengan begitu kedua negara ini saling bekerja sama guna menstabilkan keamanan regional nya agar terhindar dari ancaman negara lain yang mengancam keamanan nasional, selain itu kedua negara tersebut saling memiliki kepentingan negara nya masing-masing dengan begitu, kedua negara tersebut menjalin kerja sama dengan kepentingan masing-masing dan juga karena ada nya ancaman dari negara Iran.

2.2.2 Keamanan Tradisional

Keamanan atau yang Bahasa Inggris nya *security* merupakan dari bahasa latin yaitu "*securus*" yang memiliki arti terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman. Keamanan dapat dilihat dari dua perspektif, ada konsep keamanan tradisional yang didefinisikan sebagai keamanan suatu negara yang dapat ditentang oleh militer negara lain dan harus dipertahankan oleh negara dengan kekuatan militer. Dalam pendekatan ini, negara adalah subjek dan objek dari penciptaan keamanan. Pertahanan dianggap sebagai instrumen utama negara dalam mencapai keamanan nasional, meskipun konsep keamanan nasional telah mengalami perkembangan sejak akhir tahun 1940-an untuk memperhatikan aspek wilayah, kedaulatan, dan individu warga negara. Tugas dan kekuatan negara

dalam menciptakan keamanan nasional menjadikan pertahanan sebagai bagian penting dari sektor publik.

Pembiayaan untuk keamanan nasional mempunyai posisi yang istimewa karena merupakan prasyarat bagi stabilitas nasional, kemajuan ekonomi dan sosial, situasi politik, serta tujuan penciptaan keamanan. Selain itu, pendekatan kedua yaitu keamanan non-tradisional yang merujuk pada kebutuhan keamanan aktor non-negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa pertahanan memainkan peran sentral dalam menciptakan keamanan nasional, sementara konsep keamanan nasional telah berkembang untuk mencakup aspek wilayah, kedaulatan, dan individu warga negara. Tugas dan kekuatan negara dalam menciptakan keamanan nasional menjadikan pertahanan sebagai elemen penting dalam sektor publik. Pendanaan untuk keamanan nasional memiliki status yang khusus karena menjadi prasyarat bagi stabilitas nasional, kemajuan ekonomi dan sosial, politik, kesehatan, dan sistem demokrasi (Mardhani et al., 2020).

Kerja sama keamanan tradisional seringkali melibatkan berbagai bentuk kerja sama militer, seperti aliansi pertahanan, perjanjian pertahanan bersama, atau operasi militer bersama. Negara-negara dapat menggabungkan sumber daya mereka, berbagi informasi intelijen, atau melakukan latihan militer bersama guna meningkatkan kapabilitas pertahanan dan menghadapi ancaman bersama.

Menurut Barry Buzan, dalam bukunya yang mempunyai judul "*People, States and Pear*" menjelaskan bahwa keamanan terbagi menjadi lima sektor yakni Militer, politik, lingkungan, ekonomi dan social. Menurut pendekatan ini, sektor militer hanyalah salah satu aspek penting dari konsep keamanan. Sementara itu, keamanan yang lebih luas dan menyeluruh akan dipengaruhi pula oleh sektor

politik, ekonomi, sosial dan lingkungan baik dari peringkat individu, nasional, regional dan global (Perwita, 2008).

Teori keamanan ini sangat menggambarkan situasi yang dialami oleh kedua belah pihak antara Uni Emirat Arab dengan Israel yang sedang menjalin kerja sama dalam perjanjian *Abraham Accords*, yang mana kedua negara tersebut menyetujui perjanjian tersebut di latar belakang oleh ancaman dari Iran yang mengancam akan menyerang secara terang-terangan kepada kedua negara tersebut (Dockery, 2018).

Selain itu, Israel sangat memprioritaskan ancaman dari Iran lebih dari apapun dan menjadi sebuah tantangan yang paling penting, karena adanya isu terkait nuklir Iran yang mana Uni Emirat Arab dan Israel saling mengambil tindakan tegas untuk menolak salah satu klausul dalam draf kesepakatan nuklir Iran, dan juga Israel dan Uni Emirat Arab menuduh Garda Revolusi Iran berada di balik aksi para loyalis Iran di Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak melancarkan serangan atas sasaran Israel, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi (ABD Rahman, 2022).

Dalam buku yang berjudul *"People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era"* yang ditulis oleh Buzan, Buzan memiliki point-point penting yang diungkapkan oleh dirinya, yaitu Konsep keamanan adalah cara yang berguna untuk memahami hubungan internasional, Keamanan adalah keadaan di mana negara atau masyarakat merasa bebas dari ancaman yang mengganggu kepentingan vital mereka, ancaman terhadap keamanan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, keamanan internasional tidak hanya melibatkan negara,

tetapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan, keamanan internasional dapat dicapai melalui kerja sama dan dialog antara negara dan masyarakat internasional, konsep keamanan juga dapat membantu memahami berbagai isu global seperti contohnya yaitu perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dalam bukunya, Buzan menekankan pentingnya memahami konsep keamanan dalam konteks hubungan internasional dan bagaimana konsep tersebut dapat membantu mencapai perdamaian dan stabilitas di tingkat internasional (Barry Buzan, 2016).

2.2.3 Kerja Sama Internasional

Setiap negara sudah dipastikan membutuhkan negara lain untuk bisa saling bekerja sama satu sama lain, dengan tujuan dan keuntungan yang sama yaitu demi kepentingan negara nya dan juga demi kemajuan negara nya. Karena setiap negara akan sangat kesulitan jika tidak mengambil kerja sama dengan negara lain, selain itu setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan nya masing-masing entah itu memiliki kelebihan dari sumber daya alam nya yang sangat melimpah atau dari sumber daya manusia nya yang sangat baik.

Menurut para ahli, kerja sama internasional sebagai berikut:

1. Perwita dan Yani

“Kerja sama internasional merupakan sistem hubungan yang dibuat berdasarkan kehidupan internasional dan terbagi dalam berbagai macam bidang seperti bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, lingkungan hidup, kesehatan, pertahanan serta keamanan.”

2. Dougherty dan Pfaltzgraff

“Kerja sama internasional merupakan hubungan yang dijalin antar negara dan tidak ada unsur kekerasan maupun paksaan serta disahkan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan untuk membangun negaranya sendiri.”

3. Holsti

“Kerja sama merupakan kolaborasi yang dilakoni oleh setiap negara ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Masalah tersebut dianggap perlu ditangani dengan baik karena dapat mengancam kesatuan dan persatuan negara, oleh karena itu negara berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menjalin kerja sama dengan negara lain” (Aris Yusuf, n.d.).

Kerja sama internasional dilakukan oleh negara-negara di berbagai bidang, akan dikembangkan oleh mitra kerja sama di bidang ekonomi, politik, pembangunan, dan keamanan. Kerja sama internasional mengacu pada hubungan kerja sama antara dua atau lebih negara merdeka yang bekerja sama dengan negara berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama jenis ini merupakan upaya untuk mencapai keuntungan bersama antara satu negara dengan negara lainnya. Bisa bilateral atau multilateral. Setiap negara mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, melalui kerja sama internasional, mereka dapat menonjolkan kelebihanannya dan menyembunyikan kelemahannya. Dengan cara ini, pembangunan negara tidak akan terhambat, dan terbuka jalan bagi pengembangan peluang internal. Kerja sama internasional memiliki tujuan:

1. Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara,
4. Mencegah dan menghindari konflik yang terjadi,
5. Memperoleh pengakuan kemerdekaan,
6. Mempererat hubungan antar negara, diberbagai aspek dan bidang,
7. Membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi,
8. Menggali dan mengembangkan potensi masing-masing negara,
9. Membantu membebaskan kemiskinan,
10. Memajukan perdagangan dengan meningkatkan kemakmuran negara yang terlibat.

Semua negara di dunia tidak bisa benar-benar sendirian, demi kepentingan bersama masing-masing negara harus bekerja sama dengan negara lain. Hal ini tidak berarti bahwa terdapat cukup sumber daya dalam hal wilayah, manusia dan teknologi. Untuk hidup berdampingan, setiap negara harus mengikuti atau berpartisipasi dalam kerja sama internasional. Bekerja sama artinya saling meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Kerja sama global muncul karena hal-hal berikut:

1. Perbedaan sumberdaya alam,
2. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah,
3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Perbedaan ideologi.

Tidak semua negara di dunia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama dengan meningkatkan pembangunan dan kemajuan negaranya sendiri. Begitu pula dengan negara-negara di dunia yang semakin memperkuat posisi saling ketergantungan global, yang semakin tercermin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa berdasarkan prinsip saling percaya, saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerja sama dapat terjalin dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, keamanan dan dapat terjalin antara satu negara dengan negara lain (Amanullah, 2021).

Dengan penjelasan tersebut, melahirkan satu turunan teori, yaitu diplomasi keamanan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Diplomasi Keamanan:

Kata diplomasi sering digunakan dalam perbincangan sehari-hari, namun diplomasi sendiri memiliki banyak arti. Salah satunya dari sebuah buku yang berjudul “*Random House Dictionary*” diplomasi diartikan sebagai:

“Tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negaranegara; seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut; kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, menghadapi orang-orang, dengan demikian ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang bersifat dendam”

Dalam praktiknya, penting untuk membedakan antara diplomasi dan politik luar negeri, karena keduanya memiliki peran yang berbeda meskipun saling terkait. Hal ini mengharuskan adanya batasan yang jelas antara kedua konsep tersebut. Diplomasi bukanlah sebuah kebijakan itu sendiri, tetapi lebih merupakan sebuah lembaga yang digunakan untuk memengaruhi pembuatan kebijakan. Namun demikian, diplomasi dan kebijakan luar negeri saling melengkapi karena tidak mungkin untuk bertindak secara efektif tanpa kerja sama antara keduanya.

Diplomasi tidak dapat dipisahkan secara tegas dari politik luar negeri, namun keduanya bekerja bersama-sama untuk merumuskan strategi, diplomasi, dan taktik dalam hubungan internasional. Di satu sisi, kebijakan luar negeri menitikberatkan pada substansi dan isi dari hubungan internasional, sedangkan di sisi lain, diplomasi berkonsentrasi pada metode pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Diplomasi merujuk pada berbagai cara yang digunakan dalam hubungan internasional, seperti perundingan yang dilakukan oleh duta besar dan seni diplomatik. Ini melibatkan komunikasi antara berbagai pihak, termasuk negosiasi

antara wakil-wakil yang diakui secara resmi. Praktik-praktik semacam itu telah melembaga sejak lama dan menjadi dasar dari aturan-aturan hukum internasional.

Oleh karena itu, diplomasi juga merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan memperoleh dukungan terkait dengan prinsip-prinsip yang mereka anut. Ini mencerminkan pentingnya diplomasi sebagai elemen kunci dalam upaya membangun hubungan yang harmonis dan memperoleh keuntungan bersama di tingkat internasional (Setiawan, 2016).

Diplomasi Pertahanan menurut Halkis (2018) sulit dibeda antara praktek dan teori, karena Studi Diplomasi Pertahanan merupakan irisan berbagai diplomasi dalam konteks pertahanan negara (Soegeng, 2021).

Diplomasi Pertahanan adalah suatu strategi yang melibatkan berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan bukan hanya tentang menjalin hubungan dengan negara lain dalam hal keamanan dan pertahanan, tetapi juga tentang memperkuat kemitraan dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai kepentingan bersama. Gregory Winger menggambarkan diplomasi pertahanan sebagai bentuk penggunaan militer yang lebih lunak dan berorientasi pada kerja sama, seperti melalui pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, dan latihan militer bersama. Melalui kerja sama ini, negara-negara dapat membangun saling pengertian dan kepercayaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas di tingkat regional maupun internasional.

Martin menambahkan dimensi baru dalam pemahaman diplomasi pertahanan dengan menekankan penggunaan militer untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ini mencakup penggunaan kekuatan militer dalam konteks yang tidak bersifat agresif atau konfrontatif, tetapi lebih kepada peningkatan kapasitas, pelatihan, dan bantuan kepada negara-negara mitra. Dengan demikian, diplomasi pertahanan dapat dilihat sebagai alat yang dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di tingkat global.

Selain itu, diplomasi pertahanan juga berperan dalam membangun citra positif suatu negara di mata dunia. Dengan menunjukkan keterbukaan, kerja sama, dan komitmen untuk berkontribusi pada keamanan global, sebuah negara dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat internasional. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan bukan hanya tentang mempertahankan keamanan nasional, tetapi juga tentang membangun reputasi dan pengaruh yang positif di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, diplomasi pertahanan merupakan instrumen yang kompleks dan multifaset, yang melibatkan berbagai aktor dan aspek. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan holistik, negara-negara dapat memanfaatkan diplomasi pertahanan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan keamanan, kemitraan, dan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan (Lailatul Mufidah, 2021).

2.3.Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori realisme, keamanan tradisional, dan kerja sama internasional, yang mana Uni Emirat Arab dengan Israel saling bekerja sama dan

diikuti oleh negara lain, dengan salah satunya dalam bidang keamanan. Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki sebuah ancaman yang sama, ancaman militer dari Iran, dengan begitu kedua negara tersebut mendasari kepentingan tersebut untuk mengembangkan keamanan regional, dengan harapan untuk menstabilkan keamanan dalam regional nya. Persepsi ancaman tersebutlah yang dihadapi Uni Emirat Arab dan Israel dari Iran sehingga mereka membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam mempertahankan keamanan nasional masing-masing dan juga keamanan regional.

2.4. Kerangka Analisis

